

BADAN AKREDITASI NASIONAL

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor: 1857/BAN-SM/SK/2022, menyatakan bahwa:

Sekolah/Madrasah : SMK NEGERI 09

NPSN : 20328969

: JL. PETERONGANSARI NO. 2, PETERONGAN, KEC. Alamat

SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH

Terakreditasi A (Unggul) dengan Nilai 92

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2027 Perpanjangan status akreditasi ini diberikan berdasarkan penilaian sistem terhadap perkembangan kinerja sekolah/madrasah.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE. Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 November 2022 Ditandatangani secara elektronik oleh: Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Dr. Toni Toharudin, M.Sc.



SMK NEGERI 09

Identitas Satuan Dokumen dan Perijinan Sarana dan Prasarana Kontak Peta

Nama :SMK NEGERI 09

NPSN :20328969

Alamat : JL. PETERONGANSARI No. 2

Desa/Kelurahan : PETERONGAN

Kecamatan/Kota (LN) : KEC. SEMARANG SELATAN

Kab.-Kota/Negara (LN) : KOTA SEMARANG
Propinsi/Luar Negeri (LN): PROV. JAWA TENGAH

Status Sekolah : NEGERI
Bentuk Pendidikan : SMK
Jenjang Pendidikan : DIKMEN

Pusdatin © Kemendikdasmen 2025



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/242/2025

TENTANG

PENGGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH SEKOLAH MENENGAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI SMK NEGERI 9 SEMARANG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
 - b. bahwa permohonan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 9 SEMARANG dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi svarat untuk diterbitkan izin:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMK NEGERI 9 SEMARANG.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 ha1.8692):
 - 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Balai Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE. BSSN.

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
 Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar
 Nasional Pendidikan;
- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan:
- 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

- Penyelenggaraan Pendidikan;
- 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Pendidikan Khusus Satuan dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34):
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 tentangOrganisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 2. Surat Permohonan Kepala SMK NEGERI SEMARANG Nomor 400.3.8/204.1/2025 Tanggal 12 Maret 2025 Perihal Permohonan Pengganti Izin Pendirian SMK:
 - 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 400.7.9.4/02366 Tanggal 10 Maret 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian;
 - 4. Surat Laporan Kehilangan Barang dari Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang Nomor SKTLK/606/II/2025/RES TBS SMG/JATENG Tanggal 25 Februari 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas Kejuruan Negeri (SMK Negeri), sebagai berikut:

1. Nama : Pemerintah Provinsi Jawa

Penyelenggara Tengah

2. Nama Satuan : SMK NEGERI 9 SEMARANG

Pendidikan

3. NPSN : 20328969

4. Alamat : Jalan Peterongansari No. 2

> Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa

Tengah



Balai Besar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE. BSSN.

5. Nomor SK : 0287/C/76

Pendirian Lama

6. Tanggal SK : 11 November 1976

Pendirian Lama

7. Instansi Penerbit : Departemen Pendidikan SK Pendirian Lama Nasional Kantor Wilayah

Propinsi Jawa Tengah

8. Bidang Keahlian : Teknologi Informasi; Bisnis dan

Manajemen

9. Program Keahlian : Pengembangan Perangkat

Lunak dan Gim; Pemasaran; Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis; Akuntansi dan

Keuangan Lembaga

10. Konsentrasi : Rekayasa Perangkat Lunak; Keahlian Bisnis Digital: Bisnis Retail:

Bisnis Digital; Bisnis Retail; Manajemen Perkantoran:

Akuntansi

KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah

Kejuruan (SMK) SMK NEGERI 9 SEMARANG Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG pada tanggal 19 Maret 2025 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH





SAKINA ROSELLASARI

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth:



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN,

- 1. Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Direktur SMK, Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Layanan Khusus Kemendikdasmen Republik Indonesia;
- 3. Setda Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.

